

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Definisi bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 yaitu sebuah lembaga penghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan lalu disalurkan pada pihak masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau wujud lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan definisi bank menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang akuntansi perbankan merupakan sebuah badan usaha penghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada pihak masyarakat dalam wujud kredit dan/atau wujud lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kasmir (2015) menyatakan bahwa bank adalah lembaga perantara keuangan antar masyarakat kekurangan dana dengan masyarakat *surplus* dana.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan definisi bank bank yaitu badan usaha penghimpun dana sekaligus sebagai perantara keuangan antara pihak yang mengalami *surplus* dana dengan pihak yang memerlukan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan fungsi utama dari perbankan di Indonesia adalah sebagai badan penghimpun serta tempat untuk menyalurkan dana masyarakat. Sedangkan menurut Latumaerissa (2011) fungsi bank antara lain sebagai :

1. *Agent of Trust*

Kegiatan intermediasi bank dilaksanakan atas dasar rasa kepercayaan. Hal ini merujuk pada kegiatan pengumpulan dana harus berdasarkan pada rasa percaya dari pihak masyarakat terhadap eksistensi dan kredibilitas perbankan

2. *Agent of Development*

Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab pihak perbankan untuk menunjang kelancaran transaksi setiap pelaku.

3. *Agent of Service*

Selain memberikan pelayanan-pelayanan atas jasa keuangan, bank harus ikut serta memberikan berbagai macam jasa pelayanan lainnya misalnya inkaso, jasa transfer dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank tidak hanya sebagai tempat untuk menyalurkan dana saja. Bank juga dapat melakukan kegiatan seperti jasa transfer antar bank. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pihak

perbankan untuk menunjang kelancaran berbagai transaksi setiap pelaku.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank di Indonesia

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 dalam Kasmir (2015) jenis-jenis perbankan yang diakui secara resmi terdiri dari :

1. Bank Umum

Menjalankan usahanya secara konvensional dan atau syariah serta memberikan berbagai jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menjalankan usaha dengan konvensional atau syariah. Namun dalam lalu lintas pembayaran BPR tidak memberikan jasa.

Menurut Budisantoso dan Nuritmo (2014) perbankan digolongkan dalam berbagai macam klasifikasi, meliputi :

1. Kegiatan usaha

Penggolongan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa pengelompokan perbankan berdasarkan kegiatan usaha terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat

2. Bentuk badan usaha

Perbankan ini terdiri atas perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah serta bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

3. Pendirian dan kepemilikan

a. Bank Umum

Bank umum hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia maupun warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruhnya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

4. Target pasar

a. *Retail Bank*

Perbankan ini memfokuskan pelayanan serta transaksi kepada para nasabah ritel yaitu nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil.

b. *Corporate Bank*

Perbankan ini fokus pada pelayanan dan transaksi kepada nasabah yang berskala besar biasanya berbentuk korporasi.

c. *Retail-Corporate Bank*

Perbankan ini tidak hanya fokus pada nasabah ritel saja tapi juga kepada nasabah korporasi. Hal ini dikarenakan

perbankan dengan jenis *Retail-Corporate Bank* memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan.

5. Fungsi

a. Bank Sentral

Perbankan in merupakan badan umum milik negara yang memiliki tugas untuk membantu pemerintah.

b. Bank Umum

Sumber utama dana bank umum berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana seperti Bank Danamon, Bank Permata, BCA dan sebagainya

c. Bank Pembangunan

Pengumpulan dana perbankan ini berasal dari penerimaan simpanan deposito serta *commercial paper* seperti Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank DKI dan sebagainya.

d. Bank Desa

Bank desa merupakan kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah.

e. BPR

BPR merupakan kantor bank di kota kecamatan yang menjadi unsur penghimpun dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan.

6. Status kepemilikan

a. Bank Milik Negara

Bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah undang-undang tersendiri seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan BTN.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia misalnya BCA, Bank Mega, Bank Permata dan sebagainya.

c. Bank Swasta Asing

Bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia seperti Citibank, HSBC, Rabobank dan Cammonwealth.

d. Bank Pembangunan Daerah

Bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan hartanya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan seperti Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Papua, Bank Jabar, Bank DKI dan sebagainya.

e. Bank Campuran

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional seperti Bank UOB Buana, Bank DSB Indonesia dan sebagainya.

7. Kegiatan operasional

a. Bank Devisa

Bank yang memiliki hak dan wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing diluar negeri seperti Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Permata dan sebagainya.

b. Bank Nondevisa

Bank yang dalam operasionalnya hanya melakukan transaksi didalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing diluar negeri.

8. Penciptaan uang giral

a. Bank Primer

Bank yang dalam operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas.

b. Bank Sekunder

Bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung.

9. Sistem organisasi

a. *Unit Banking System*

Bank yang kegiatannya operasionalnya hanya memiliki 1 kantor dan melayani masyarakat di sekitar wilayah tersebut seperti BPR konvensional dan BPR syariah.

b. *Branch Banking System*

Bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang dimana sistem organisasi, keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat seperti BCA, Bank Mandiri dan BNI.

c. *Holding Company Bank*

Sebuah bank yang memiliki 1 atau lebih bank seperti pada 1990 di Amerika Serikat terdapat 6.400 HCB dan 5.000 diantaranya dimiliki oleh 1 bank.

d. *Multi Holding Company Bank*

Bank yang memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan nonperbankan seperti sekitar 1.000 bank berbentuk MHCB menguasai 70% total aset perbankan di Amerika Serikat.

e. *Correspondent Banking*

Hubungan sistem antarbank di mana terdapat suatu pengaturan informasi antarbank sehingga bank-bank kecil

mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya.

10. Letak geografis

a. Komunitas Bank Lokal

Bank yang beroperasi secara terbatas di daerah (desa) tertentu.

b. Bank Regional

Bank yang beroperasi di pasar perkotaan.

c. Bank Multinasional

Bank yang lingkup operasinya sampai pada tingkat nasional maupun internasional seperti *Bank of Credit and Company International* milik Abu Dhabi yang beroperasi di Caymen Island dan Luksemburg

Bank dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi. Akan tetapi pengklasifikasian jenis-jenis bank secara resmi hanya berdasarkan jenis usaha saja. Pengklasifikasian secara resmi tersebut tercantum dalam undang-undang.

2.1.1.4 Kegiatan Perbankan

Lembaga keuangan dalam menjaga usahanya tidak terlepas dari lingkup keuangan. Bank akan melayani segala kebutuhan yang diperlukan nasabahnya dalam bidang ini. Kegiatan utama perbankan adalah penghimpunan dana dalam bentuk simpanan lalu menjual uang tersebut dengan cara menyalurkan dana berbentuk pinjaman kepada pihak masyarakat.

Bank umum adalah bank yang paling banyak di Indonesia (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 2015). Apabila dibandingkan dengan BPR, bank umum memiliki lebih banyak keunggulan. Bukan hanya beragamnya pelayanan yang diberikan namun juga jangkauan wilayah operasionalnya. Menurut Kasmir (2015) kegiatan bank meliputi :

1. Menghimpun dana (*Funding*) yaitu pembelian dana pihak masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan penawaran atas jenis-jenis simpanan meliputi giro, tabungan maupun deposito.
2. Menyalurkan dana (*Lending*) adalah salah satu aktivitas bank dalam menjual dana yang awalnya dibeli dari masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian kredit.
3. Memberikan jasa lainnya (*Services*) yaitu aktivitas yang menunjang tingkat kelancaran aktivitas *funding* serta *lending*. Meskipun berperan sebagai penunjang, aktivitas ini juga memberikan kontribusi atas keuntungan bagi bank. *Transfer*, kliring, inkaso, bank garansi, L/C adalah beberapa contoh jasa-jasa yang ditawarkan.

Menurut SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990 kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan meliputi penghimpunan sekaligus penyaluran dana kepada pihak masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah perbankan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama perbankan. Disamping itu terdapat kegiatan lain yang dilakukan oleh bank berupa *service* yang dapat menunjang kemudahan kegiatan berbagai pihak-pihak berkepentingan. Salah satu contoh *service* yang dilakukan adalah kliring.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan pembiayaan berbentuk uang maupun tagihan lain yang nilainya bisa diukur dengan uang (Kasmir, 2015). Selain itu, kredit dalam bahasa latin kredit berasal dari “*credere*” yaitu percaya. Pihak penyalur kredit percaya pada penerima bahwa kredit akan dikembalikan sesuai perjanjian, sehingga dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 kredit yaitu penyediaan uang maupun tagihan lainnya yang dapat dipersamakan sesuai kesepakatan pinjam meminjam antar pihak perbankan dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam melunasi kewajiban beserta dengan bunganya setelah jangka waktu tertentu. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antar pihak perbankan dengan pihak lain dan mewajibkan pihak peminjam melunasi kewajiban setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian kredit adalah pembiayaan bank dalam bentuk uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang serta dilandasi kepercayaan terhadap nasabah atas pelunasan sesuai perjanjian yang disepakati. Kredit yang disediakan oleh bank tidak hanya berupa uang saja tapi juga berupa tagihan yang nilainya dapat diukur oleh uang misalnya pembiayaan kredit dalam rangka pembelian rumah oleh bank.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit disalurkan berdasarkan pada rasa kepercayaan. Hal tersebut membuat perbankan hanya akan memberikan kredit jika bank tersebut yakin debitur dapat mengembalikan sesuai jangka waktu serta syarat sesuai kesepakatan. Menurut Kasmir (2015) terdapat unsur-unsur dalam aktivitas penyaluran kredit meliputi :

1. Kepercayaan yaitu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang disalurkan diterima kembali sesuai jangka waktu.
2. Kesepakatan tertera dalam sebuah perjanjian dimana semua pihak menandatangani hak serta kewajibannya sendiri-sendiri.
3. Jangka waktu yaitu waktu pengembalian sebuah kredit meliputi jangka pendek, menengah serta panjang.
4. Risiko dapat muncul akibat tenggat waktu pengembalian.

Tenggang waktu pengembalian memungkinkan munculnya risiko tidak tertagih sebuah kredit. Panjangnya jangka waktu yang diberikan mengindikasikan semakin besarnya risiko tidak tertagih kredit tersebut.

5. Balas jasa adalah pendapatan atas kegiatan penyaluran kredit. Dalam bank umum swasta nasional dikenal dengan sebutan bunga. Selain itu bank membebankan administrasi bank kepada nasabah yang juga termasuk dalam keuntungan bank.

Menurut Fahmi (2014) terdapat 6 unsur yaitu kepercayaan, waktu, risiko, prestasi, adanya kreditur, dan adanya debitur. Keenam unsur tersebut terdapat dalam aktivitas penyaluran kredit. Kepercayaan menjadi unsur utama dalam penyaluran kredit karena dalam kegiatan tersebut harus dilandasi dengan rasa percaya oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Penyaluran kredit pihak perbankan dapat merangsang kedua pihak untuk saling menolong memenuhi kebutuhan. Bank memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam memberikan fasilitas kredit. Hal ini tidak berhubungan dengan misi perbankan didirikan.

1. Tujuan Kredit

Kegiatan penyaluran kredit memiliki berbagai macam tujuan yang tergantung pada tujuan bank tersebut. Sebab, tujuan penyaluran tidak lepas dari misi yang dimiliki pihak perbankan.

Berikut tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2015) :

a. Mencari keuntungan

Keuntungan yang diterima bank berupa bunga atas balas saja serta biaya administrasi yang nantinya dibebankan kepada pihak nasabah. Penting bagi sebuah bank untuk

meningkatkan keuntungan yang diperoleh sebab biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak bank cukup besar.

b. Membantu usaha nasabah

Dana yang diterima dapat digunakan untuk mengembangkan usaha maupun memperluas usanya. Sehingga bank dan nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Meningkatnya pembangunan diberbagai sektor salah satunya diakibatkan oleh banyaknya kredit yang disalurkan.

Sedangkan menurut (Abdullah, 2017) penyaluran kredit memiliki tujuan, diantaranya :

- a. Mencari keuntungan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atas penyaluran kredit seperti bunga sebagai bentuk balas jasa serta biaya administrasi yang telah menjadi kesepakatan kedua pihak.
- b. Membantu usaha pihak yang memerlukan dana untuk melakukan modal usaha ataupun investasi.
- c. Membantu pihak pemerintah karena banyaknya jumlah penyaluran kredit artinya semakin baik. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan adanya peningkatan pembangunan dari berbagai sektor.

Tujuan penyaluran kredit oleh pihak perbankan sangat banyak tapi tujuan utama bank menyalurkan kredit adalah

memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut berupa bunga yang sudah menjadi kesepakatan.

2. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2015) fungsi dilakukannya aktivitas penyaluran kredit meliputi :

a. Meningkatkan daya guna uang

Penyaluran kredit membuat uang berguna bagi debitur dalam menghasilkan barang atau jasa yang nanti akan menghasilkan uang untuk membayar pokok pinjaman serta bunga.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Penyaluran kredit membuat uang dapat beredar dari 1 daerah ke daerah lain. Alhasil beberapa tempat yang mengalami kekurangan memperoleh tambahan dari daerah lain.

c. Meningkatkan daya guna barang

Penyaluran kepada debitur dapat dimanfaatkan untuk mengolah barang tidak berguna menjadi barang berguna.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit mampu meningkatkan dan memperlancar peredaran barang dari 1 daerah ke daerah lain. Alhasil diberbagai wilayah jumlah barang menjadi naik.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit mampu meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan. Kredit membantu ekspor ke luar negeri. Alhasil devisa negara mengalami peningkatan.

f. Meningkatkan hubungan internasional

Hubungan debitur dan kredit dapat meningkat karena pinjaman internasional. Kredit yang disalurkan oleh negara lain mampu meningkatkan kerja sama. Alhasil perdamaian dunia tercipta.

g. Meningkatkan kegairahan berusaha

Kegairan berusaha menerima kredit akan meningkat apalagi nasabah yang dengan modal pas-pasan. Melalui dana yang diterima dapat digunakan oleh debitur untuk memperluas area usahanya.

h. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Apabila kredit diberikan kepada pihak yang ingin memperluas usahanya atau membangun pabrik untuk memperlancar proses produksi tentunya membutuhkan tenaga kerja. Alhasil peningkatan pemerataan pendapatan tercipta dan dapat mengurangi pengangguran.

Menurut Sudirman (2013) fungsi penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah untuk meningkatkan daya guna uang berupa penggunaan modal usaha oleh pihak perusahaan, peredaran lalu lintas pembayaran, alat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut fungsi utama dari penyaluran kredit adalah meningkatkan daya guna uang. Kredit

yang disalurkan menghasilkan barang maupun jasa yang nantinya akan menghasilkan uang salah satunya untuk membayar pokok pinjaman serta bunga yang telah disepakati. Disamping fungsi utama, penyaluran kredit juga memiliki fungsi lain yang dapat meningkatkan perekonomian serta lapangan kerja, alat stabilitas ekonomi, daya guna barang dan sebagainya.

2.1.2.4 Kualitas Kredit

Setiap kredit yang disalurkan memiliki kemungkinan realisasi atas pembayaran bunga serta pokok pinjaman berbeda dari debitur atau kolektabilitas yang berbeda (Budisantoso & Nuritomo, 2014). Surat Edaran Bank Indonesia 7/3/DPNP terkait penilaian kualitas kredit menggolongkan kolektabilitas tersebut menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu menjadi fokus bank dalam menetapkan kualitas kredit. Faktor-faktor tersebut telah dijelaskan oleh BI melalui Surat Edaran No. 7/3/DPNP meliputi :

1. Prospek usaha berhubungan dengan kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dan afiliasi serta upaya pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Kinerja debitur erat kaitannya dengan perolehan data, struktur permodalan, arus kas serta sensibilitas dengan risiko pasar.

3. Kemampuan membayar berhubungan dengan ketepatan pembayaran pokok pinjaman serta bunga, ketersediaan dan kekuatan informasi debitur, kelengkapan dokumentasi serta kepatuhan perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas BI menggolongkan kolektabilitas kredit menjadi lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet. Selain itu BI juga menetapkan 3 faktor dalam menetapkan kualitas kredit yang dimiliki bank yaitu prospek usaha, kinerja debitur serta kemampuan membayar.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Umumnya jenis kredit dilihat dari bermacam segi. Menurut Kasmir (2015) jenis kredit meliputi :

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit modal kerja untuk meningkatkan produksi operasional.
 - b. Kredit investasi untuk memperluas usaha maupun membangun pabrik maupun rehabilitasi.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif meningkatkan produksi, usaha maupun investasi.
 - b. Kredit konsumtif untuk konsumsi pribadi
 - c. Kredit perdagangan untuk pembelian dagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Jangka pendek dengan masa pengembalian 1 tahun.

- b. Jangka menengah dengan masa pengembalian 1-3 tahun.
 - c. Jangka panjang dengan masa pengembalian 3/5 tahun.
4. Dilihat dari segi jaminan
- a. Kredit jaminan diberikan dengan jaminan barang berwujud, tidak berwujud maupun orang.
 - b. Kredit tanpa jaminan diberikan tanpa jaminan barang atau orang.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
- a. Kredit pertanian untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian.
 - b. Kredit peternakan untuk membiayai sektor peternakan.
 - c. Kredit industri digunakan untuk membiayai industri kecil, menengah maupun besar.
 - d. Kredit pertambangan digunakan untuk membiayai sektor pertambangan.
 - e. Kredit pendidikan untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan.
 - f. Kredit profesi diberikan kepada pihak professional seperti dosen, pengacara atau dokter.
 - g. Kredit perumahan digunakan untuk membiayai pembangunan maupun pembelian rumah.
 - h. Dan sektor lain.

Menurut Fahmi (2014) pengklasifikasian jenis-jenis kredit dibedakan menjadi 2 yaitu kredit berdasarkan jenis dan

kredit menurut jangka waktu. Pengklasifikasian kredit berdasarkan jenis meliputi kredit konsumtif, produktif, investasi, modal kerja dan perdagangan. Sedangkan kredit dari jangka waktu terdiri dari kredit jangka pendek, menengah dan panjang.

Berbagai macam pengklasifikasian kredit dilakukan untuk melihat apa saja kebutuhan masyarakat atas dana yang diterima. Seperti investasi, modal kerja maupun kebutuhan konsumtif. Selain itu jangka waktu yang diberikan bank kepada pihak penerima dana berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan pihak debitur. Jangka waktu yang diberikan kepada debitur dengan kebutuhan konsumtif akan berbeda dengan jangka waktu kredit jenis konsumtif.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Nugroho, 2017). Menurut Khalifaturofi'ah (2012) kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja keuangan merupakan hasil yang dicapai suatu bank dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Diffia, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi keuangan suatu periode tertentu serta sejauh mana

perusahaan telah menerapkan aturan pelaksanaa keuangan dengan baik dan benar dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan.

Penilaian kinerja bank dibutuhkan bagi para *stakeholders* bank seperti manajemen bank dan nasabah. Menurut Rusdiana (2012) penilaian kinerja bank memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh sebuah organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kebersihan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Penilaian kinerja erat kaitannya dengan tingkat kesehatan perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan tujuan dari perbankan Indonesia adalah menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2.1.4 Rasio Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2017) rasio keuangan adalah rasio yang berguna untuk melihat kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan sebuah perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berguna sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Hery, 2016). Menurut Rudianto (2013) rasio keuangan adalah metode analisis untuk mengetahui perbandingan antara satu akun tertentu dan akun lain dalam laporan keuangan suatu perusahaan serta hubungan di antara akun-akun tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan perhitungan rasio dengan membandingkan akun satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan yang berguna untuk menilai hubungan diantara akun-akun tersebut, kondisi keuangan serta kinerja perusahaan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2012) secara umum rasio keuangan dapat digolongkan menjadi

1. Permodalan (*Capital*) merupakan rasio yang dinilai dari segi permodalan milik perbankan yang didasarkan pada kewajiban

penyediaan modal minimum bank. Rasio permodalan terdiri atas :

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai oleh dana yang berasal dari modal sendiri yang dimiliki oleh bank
- b. Aktiva tetap terhadap modal merupakan rasio yang menunjukkan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap serta inventaris yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal bank.

2. Kualitas Aktiva (*Asset Quality*) adalah rasio yang didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio kualitas aktiva terdiri dari :

- a. Aktiva produktif bermasalah merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif.
- b. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.
- c. Pemenuhan PPAP merupakan hasil perbandingan antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah

dibentuk dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

3. Solvabilitas (*Leverage*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Rasio ini terdiri atas :

a. *Primary Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi oleh *capital equity*.

b. *Risk Assets Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan *risk assets*.

4. Rentabilitas (*Earning*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam meningkatkan keuntungan dalam suatu periode. Rasio ini terdiri atas :

a. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen untuk meningkatkan ayau memperoleh laba.

b. *Return on Equity* (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri.

c. *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih atas aktiva produktif yang dimiliki.

d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio untuk mengetahui efisiensi serta

kemampuan perbankan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

5. Likuiditas (*Liquidity*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, mampu membayar kembali pencairan dana deposannya ketika ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Rasio likuiditas ini terdiri dari :

- a. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio untuk menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.
- b. *Loan to Asset Ratio* (LAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kredit yang disalurkan atas aset yang dimiliki.

2.1.5 Rasio Rentabilitas

2.1.5.1 Pengertian Rasio Rentabilitas

Menurut Febriana (2014) rasio rentabilitas merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan sebuah bank dalam memperoleh keuntungan. Rasio rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Fitri, dkk 2011). Menurut Kasmir (2012) rasio rentabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam

meningkatkan keuntungan dalam suatu periode. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio rentabilitas adalah rasio pengukuran tingkat kesehatan perbankan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Rasio ini mempengaruhi ketersediaan serta kualitas keberhasilan bank. Bank tidak dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasional. Pengukuran rasio ini berperan dalam menilai tingkat kesehatan perbankan

2.1.5.2 Tujuan Pengukuran Rasio Rentabilitas

Menurut Febriana (2014) rasio rentabilitas bertujuan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan rentabilitas perbankan dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan dalam rangka menciptakan laba. Menurut Febrianty (2017) rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan rasio rentabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan laba selama periode tertentu untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan bank mendukung kegiatan operasional. Perbankan juga menggunakan rasio ini untuk menunjukkan tingkat efektivitas manajemen. Hal tersebut ditunjukkan dari segi laba yang diperoleh bank.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Rasio Rentabilitas

Penelitian ini menggunakan 2 alat ukur dalam rasio rentabilitas, yaitu Biaya Operasional (BOPO) dan *Net Interest Margin* (NIM).

1. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional untuk mengukur efisiensi serta kemampuan bank menjalankan aktivitas operasional (Harutiyansari, 2018). Biaya operasional diperoleh dari biaya bunga serta biaya operasional lainnya. Pendapatan operasional diperoleh dari pendapatan bunga yang diterima oleh pihak bank serta pendapatan operasional lainnya. Menurut SE BI No. 3/30/DPNP BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

2. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan bank mengelola aktiva produktif dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih (Kusumaningrum, 2016). Menurut SE Bank Indonesia No. 6/23/DPNP secara sistematis NIM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Total Aktiva Produktif}}$$

Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga (Timpaulu, dkk 2018). Sedangkan pengertian aktiva produktif menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 adalah penyediaan dana bank untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2.1.5.4 Standar Pengukuran Rasio Rentabilitas

1. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang memuat besarnya BOPO perbankan yang dapat ditolerir di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004.

Tabel 2.1 Kriteria penetapan peringkat BOPO

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	Tingkat efisiensi sangat baik
Sehat	Tingkat efisiensi baik
Cukup Sehat	$94\% < BOPO \leq 96\%$
Kurang Sehat	Tingkat efisiensi buruk
Tidak Sehat	Tingkat efisiensi sangat buruk

Sumber : Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

2. *Net Interest Margin* (NIM)

NIM merupakan salah satu proksi rasio rentabilitas. Menurut Kusumaningrum (2016) rasio rentabilitas digunakan

untuk mengukur efektifitas bank mencapai tujuan yaitu berupa *profit*.

Tabel 2.2 Kriteria penetapan peringkat NIM

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	$NIM > 3\%$
Sehat	$2\% < NIM \leq 3\%$
Cukup Tinggi	$1,5\% \geq NIM > 2\%$
Kurang sehat	$1\% < NIM \leq 1,5\%$
Tidak Sehat	$NIM < 1\%$

Sumber : Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

2.1.6 Bank Size

2.1.6.1 Pengertian Bank Size

Menurut Widjaja (2009) dalam Kurnia dan Mawardi (2012) *Bank Size* adalah indikator besar kecilnya sebuah lembaga perbankan yang ditentukan oleh beberapa hal seperti rata-rata tingkat penjualan, total penjualan dan aset. *Bank Size* merupakan skala pengukuran yang mengklasifikasikan besar kecilnya bank (Rohmah, 2017). Menurut Astrini (2018) *Bank Size* adalah besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan *Bank Size* adalah indikator pengukuran besar kecilnya sebuah perbankan yang ditentukan oleh beberapa hal seperti rata-rata tingkat penjualan, total penjualan dan total aktiva.

2.1.6.2 Tujuan Pengukuran Bank Size

Perhitungan *Bank Size* bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya ukuran dari seluruh aset yang dimiliki (Aliannuary, 2018). Sedangkan menurut Kumala dan Suryantini

(2015) *Bank Size* digunakan untuk menggambarkan kesehatan perbankan dengan cara memproksikan total aset yang dimiliki menggunakan Ln. Besarnya ukuran bank dilihat berdasarkan besarnya jumlah aset pihak bank karena aset menunjukkan jenis aktiva yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional sebuah perusahaan (Sumayah, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan *Bank Size* adalah menggambarkan tingkat kesehatan serta besar kecilnya sebuah perbankan menggunakan total aset yang dimiliki.

Asset yang dimiliki pihak perbankan meliputi kas, surat berharga, penyertaan, kredit, aktiva sewa guna usaha, penempatan pada BI dan bank lain aktiva tetap serta aktiva lain. Menurut PSAK No. 16 asset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun perusahaan, berwujud maupun tidak, berharga atau bernilai dan mendatangkan manfaat untuk seseorang maupun perusahaan yang bersangkutan.

2.1.6.3 Metode Pengukuran *Bank Size*

Menurut Peraturan OJK No. 53/PJOK.04/2017 ukuran perusahaan didasarkan pada total aset bahwa perusahaan dengan kepemilikan aset kurang dari Rp. 50.000.000.000 merupakan perusahaan dengan aset skala kecil. Sedangkan perusahaan dengan aset diatas Rp. 50.000.000.000 - Rp. 250.000.000.000 merupakan perusahaan dengan aset skala menengah.

Bank Size direpresentasikan oleh total asset dalam satuan rupiah. Perlu ditransformasikan menjadi logaritma supaya data memiliki satuan yang sama dengan variabel lain (Warno & Farida, 2017). Selain itu *Bank Size* diukur dengan logaritma natural (Ln) atas asset karena perbedaan besar aset masing-masing bank. Menurut Sumayah (2013) penggunaan Ln untuk menghindari munculnya data tidak normal. Menurut Sumayah (2013) *Bank Size* secara sistematis dirumuskan menjadi :

$$\text{Bank Size} = \text{Ln (Total Asset)}$$

2.1.6.4 Standar Pengukuran *Bank Size*

Menurut Pramudita dan Subekti (2013) besarnya aset milik perusahaan mengindikasikan banyaknya modal yang ditanam dalam aset. Peraturan OJK Nomor 53/PJOK.04/2017 menetapkan skala besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset.

Tabel 2.3 Kriteria Penetapan tingkat ukuran bank

Kriteria	Total Aset
Bank dengan aset skala kecil	< 50 milyar
Bank dengan aset skala menengah	> 50 milyar sampai 250 milyar

Sumber : Peraturan OJK No. 53/PJOK.04/2017

2.1.7 Rasio Likuiditas

2.1.7.1 Pengertian Rasio Likuiditas

Menurut Anggraeni (2011) likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan

bank untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih yang mana bank dengan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban artinya bank berada dalam kondisi likuid (Rayanti & Aziz, 2018). Menurut Kasmir (2012) rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan finansial yang harus dipenuhi saat ditagih dan bank mampu membayarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus dipenuhi secara tepat waktu dan bank mampu membayarnya. Sebuah bank dapat dikatakan likuid apabila bank tersebut mampu membayar semua hutangnya terutama hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek tersebut seperti simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Selain itu bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

2.1.7.2 Tujuan Pengukuran Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan (Pertiwi, 2021). Menurut Saniyah (2019) rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja bank terkait seberapa besar bank tersebut dapat membayar kewajiban pendeknya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas

perusahaan serta kinerja bank dalam membayar kewajiban pendeknya.

Perhitungan rasio likuiditas memberikan manfaat terhadap pihak berkepentingan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan serta manajemen perusahaan untuk menilai kemampuan. Kemudian pihak luar seperti investor dan debitur serta kreditur juga memiliki kepentingan.

2.1.7.3 Metode Pengukuran Rasio Likuiditas

Penelitian ini menggunakan *Loan to Asset Ratio* (LAR) sebagai alat ukur rasio likuiditas. LAR adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank memenuhi permintaan kredit menggunakan aset (Santosa, 2014). Menurut Dwihandayani (2017) *Loan to Asset Ratio* secara sistematis dirumuskan sebagai berikut :

$$LAR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Jumlah Aset}}$$

2.1.8 Rasio Kualitas Aset

2.1.8.1 Pengertian Rasio Kualitas Aset

Menurut Bukian (2016) rasio kualitas aset merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Rasio kualitas aset merupakan penilaian jenis-jenis aktiva yang dimiliki bank dengan cara membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) dengan aktiva produktif (AP) (Rhumi, 2010). Menurut

Fitrianto (2016) rasio kualitas aset adalah penialain terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio kualitas aset adalah tolak ukur penilaian atas kondisi aset perbankan serta kecukupan manajemen risiko kredit dengan membandingkan aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) dengan aktiva produktif (AP). Kualitas aktiva produktif di Indonesia dinilai berdasarkan pada tingkat tasgihannya meliputi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aktiva produktif merupakan penempatan bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan (Bukian, 2016).

2.1.8.2 Tujuan Pengukuran Rasio Kualitas Aset

Menurut Saniyah (2019) rasio kualitas aset bertujuan untuk mmengetahui perbandingan antara aktiva produktif yang dikategorikan berdasarkan kolektabilitas terhadap total seluruh aktiva produktif. Rasio kualitas aset bertujuan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul (Romdyanah, 2011). Menurut Fitrianto (2016) tujuan rasio kualitas aset adalah untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktifnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kualitas aset bertujuan untuk menilai kondisi serta kemampuan manajemen mengelola aktiva produktifnya melalui

perbandingan antara aktiva produktif berdasarkan kolektabilitasnya dengan seluruh aktiva produktif. Penting untuk mengetahui klasifikasi aktiva produktif dalam menghitung rasio kualitas aset. Hal ini dilakukan untuk mencari nilai aktiva produktif yang diklasifikasikan.

2.1.8.3 Metode Pengukuran Rasio Kualitas Aset

Penelitian ini menggunakan rasio *Non Performing Loan* sebagai alat ukur rasio kualitas aset. Menurut SE BI No. 3/30/DPNP NPL adalah rasio antara kredit bermasalah yaitu kurang lancar, diragukan dan macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Berdasarkan surat edaran tersebut NPL merupakan rasio untuk mengukur besarnya kredit bermasalah perbankan. Menurut SE BI No. 6/23/DPNP NPL dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

2.1.8.4 Standar Pengukuran Rasio Kualitas Aset

BI menetapkan bahwa bank harus menjaga NPL kurang dari 5%. Tertuang dalam Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 rasio NPL tidak boleh diatas 5% serta bank dengan NPL diatas 5% dianggap tidak sehat.

NPL berguna sebagai indikator risiko kredit yaitu rendahnya NPL mengindikasikan rendah kredit bermasalah (Barus & Erick, 2016). Kondisi ini menunjukkan semakin baik pula

kondisi bank. Kriteria penetapan tingkat kesehatan NPL terlihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.4 Kriteria penetapan peringkat NPL

Rasio	Predikat
<i>Non Performing Loan</i> < 5%	Sangat sehat
<i>Non Performing Loan</i> > 5%	Tidak sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2003

Apabila NPL bank diatas 5% maka hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian kesehatan perbankan. Kondisi ini mengurangi *score* yang diperoleh. Besarnya NPL menunjukkan tidak profesionalnya bank melakukan pengelolaan kredit sebab kredit bermasalah yang dimiliki cukup tinggi (Syamsuddin, 2013)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian ini :

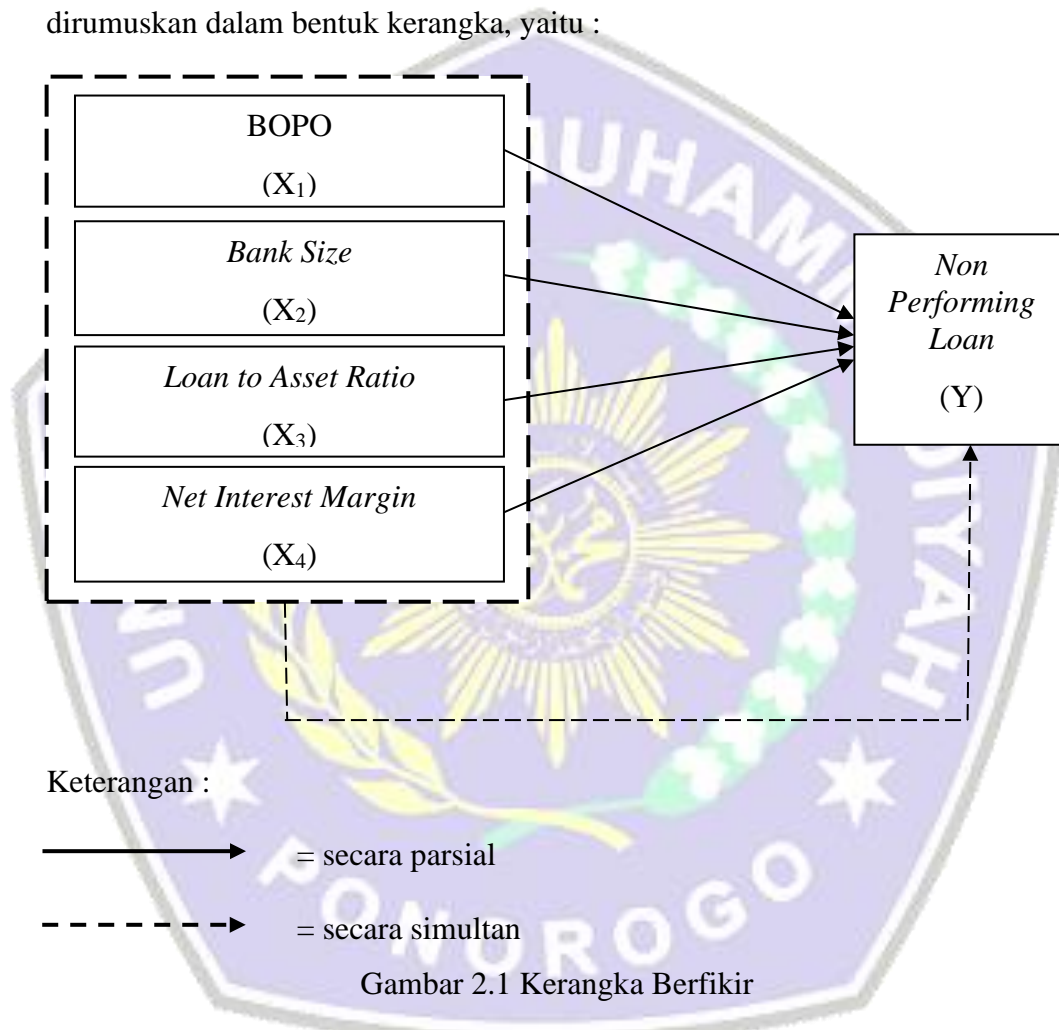
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dwihandayani, Deasy (2017)	Variabel independen: BI <i>Rate</i> , Inflasi, Kredit yang diberikan, LAR dan LDR Variabel dependen : NPL	1. BI <i>Rate</i> berpengaruh terhadap NPL 2. Inflasi berpengaruh terhadap NPL 3. Kredit yang diberikan berpengaruh terhadap NPL 4. LAR terhadap berpengaruh NPL 5. LDR berpengaruh terhadap NPL
2	Barus, Andreani, Caroline dan Erick (2016)	Variabel independen : CAR, LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI, Inflasi dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependen : NPL.	1. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL 2. LDR berpengaruh signifikan 3. NIM berpengaruh signifikan terhadap NPL

			<p>4. BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPL</p> <p>5. Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap NPL</p> <p>6. Inflasi berpengaruh terhadap NPL</p> <p>7. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap NPL</p>
3.	Kumala, Putu Ayu Sintya dan Ni Putu Santi Suryantini (2015)	<p>Variabel independen : CAR, <i>Bank Size</i> dan <i>BI Rate</i>.</p> <p>Variabel dependen : NPL</p>	<p>1. CAR berpengaruh terhadap NPL</p> <p>2. <i>Bank Size</i> berpengaruh terhadap NPL</p> <p>3. <i>BI Rate</i> berpengaruh terhadap NPL</p>
4	Firmansyah, Irman (2014)	<p>Variabel Independen : Ukuran Bank, BOPO, GDP, dan Inflasi</p> <p>Variabel Dependen : NPL</p> <p>Variabel Moderasi : FDR</p>	<p>1. Ukuran Bank tidak berpengaruh terhadap NPL</p> <p>2. BOPO tidak berpengaruh terhadap NPL</p> <p>3. GDP berpengaruh terhadap NPL</p> <p>4. Inflasi berpengaruh terhadap NPL</p> <p>5. FDR berpengaruh terhadap NPL</p> <p>6. FDR tidak memediasi pengaruh Ukuran Bank, BOPO, GDP dan Inflasi</p>
5.	Palupi, Albertha Daisy (2019)	<p>Variabel Independen : LDR, BOPO, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Inflasi dan Nilai Tukar</p> <p>Variabel Dependen : NPL</p>	<p>1. LDR berpengaruh terhadap NPL</p> <p>2. BOPO berpengaruh terhadap NPL</p> <p>3. SBDK berpengaruh terhadap NPL</p> <p>4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPL</p> <p>5. Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPL</p>

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian diatas variabel yang berkaitan dengan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kerangka, yaitu :



Setiap tahunnya NPL bank umum swasta nasional cenderung tidak stabil. Penting bagi bank mengetahui apa saja faktor internal yang dapat mempengaruhi. Faktor internal seperti inflasi tidak bisa dikendalikan oleh bank. Lebih mudah bagi bank menekan NPL melalui faktor internal.

Efisien tidaknya kinerja bank dapat diketahui melalui BOPO. Peluang munculnya NPL meningkat jika kinerja tidak efisien. Hal ini dikarenakan pengukuran efisien tidaknya bank dilihat dari penerimaan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan atas penyaluran kredit. Selain itu total aset merepresentasikan besarnya *Bank Size*. Semakin besar aset artinya jumlah kredit semakin besar dan dapat menekan tingkat *spread* bunga yang berdampak pada rasio NPL.

Tingkat likuiditas bank juga berkaitan dengan peluang munculnya kredit bermasalah. Salah satu rasio likuiditas yang dimiliki adalah LAR. Rasio ini menunjukkan jumlah aset untuk membiayai aktivitas penyaluran kredit. Hal tersebut membuat besar kecilnya aset berdampak pada kredit yang disalurkan.

Lebarnya *spread* membuat pendapatan bunga bersih bank menjadi tinggi. Berdasarkan peristiwa tersebut bank mendapat keuntungan besar tapi pihak debitur merasa dirugikan karena bunga kredit yang harus dibayar menjadi tinggi. Sehingga peluang munculnya kredit bermasalah akan semakin besar.

BOPO, *Bank Size*, LAR dan NIM berkaitan dengan penyaluran kredit. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh secara simultan antara 4 variabel terhadap NPL. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa BOPO, *Bank Size*, LAR dan NIM berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap NPL.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh BOPO terhadap *Non Performing Loan*

BOPO merupakan perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Alifah, 2014). Biaya operasional dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas utama. Pendapatan operasional diperoleh dari penyaluran kredit dan pendapatan operasional lainnya (Alifah, 2014).

Bank harus selektif menerima permintaan kredit sebab pendapatan operasional juga berasal dari pendapatan bunga atas kredit. Selain itu bank perlu meminimalisir beban operasional yang dikeluarkan karena beberapa bank mengeluarkan biaya operasional yang banyak untuk menutupi kinerja operasional terkait kredit (Palupi & Azmi, 2019). Bank dengan BOPO rendah mengindikasikan keefisienan atas pengeluaran beban operasional. Kinerja yang tidak efisien dapat meningkatkan NPL (Palupi & Azmi, 2019).

Barus dan Erick (2016) menyimpulkan BOPO berpengaruh terhadap NPL. Hal ini dikarenakan terlalu banyak beban menyebabkan bank dalam masalah. Searah dengan penelitian Palupi dan Azmi (2019) bahwa BOPO berpengaruh terhadap NPL. Terdapat perbedaan hasil penelitian Firmansyah (2014) bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap NPL.

Hipotesis yang diambil peneliti berdasarkan uraian diatas adalah BOPO berpengaruh terhadap NPL.

Ho1 : BOPO tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

Ha1 : BOPO berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

2.4.2 Pengaruh *Bank Size* terhadap *Non Performing Loan*

Bank Size adalah skala pengukuran yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya bank (Rohmah, 2017). Pengukuran dilakukan dengan logaritma natural atas asset yang dimiliki. Hal ini dikarenakan tingginya asset masing-masing bank berbeda (Faiza, 2018).

Besarnya aset menunjukkan besarnya tingkat penyaluran kredit. Besar volume kredit berpeluang untuk menekan *spread* (Astrini, 2018). Hal

tersebut membuat bunga kredit dapat diturunkan dan bank lebih kompetitif melayani nasabah. Sehingga penyaluran kredit berjalan dengan lancar.

Penelitian Kumala dan Suryantini (2015) menghasilkan *Bank Size* berpengaruh terhadap NPL. Berbanding terbalik dengan penelitian Firmansyah (2014) yaitu tidak ada pengaruh *Bank Size* terhadap NPL.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelum peneliti mengambil hipotesis bahwa *Bank Size* berpengaruh terhadap NPL.

Ho2 : *Bank Size* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

Ha2 : *Bank Size* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

2.4.3 Pengaruh *Loan to Asset Ratio* terhadap *Non Performing Loan*

Loan to Asset Ratio adalah rasio untuk mengetahui kemampuan bank memenuhi permintaan kredit menggunakan total aset (Santosa, 2014). LAR dapat digunakan untuk mengetahui likuiditas. Rasio ini diukur dengan membandingkan jumlah kredit terhadap total aset.

Tingginya LAR mengindikasikan tingkat likuiditas (Carolina & Madyan, 2015). Kondisi tersebut dikarenakan aset untuk membiayai kredit semakin besar. Besarnya biaya dialokasikan sesuai tujuan (Martina & Prastiwi, 2014). Hal ini dilakukan agar penyaluran berjalan dengan lancar.

Penelitian Dwihandayani (2017) memperoleh hasil LAR berpengaruh terhadap NPL. Berbanding terbalik dengan kesimpulan Amir, dkk (2019) bahwa LAR tidak berpengaruh terhadap NPL.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti mengambil hipotesis bahwa LAR berpengaruh terhadap NPL

Ho3 : *Loan to Asset Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

Ha3 : *Loan to Asset Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

2.4.4 Pengaruh *Net Interest Margin* terhadap *Non Performing Loan*

Net Interest Margin (NIM) menunjukkan kemampuan aktiva produktif berbentuk kredit menghasilkan pendapatan bunga bersih (Carolina & Madyan, 2015). Indikator ini dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan bunga bersih dengan aktiva produktif.

Tingginya pendapatan bunga bersih disebabkan oleh lebarnya *spread* karena suku bunga kredit lebih tinggi dari suku bunga dana (Carolina & Madyan, 2015). Meskipun bank mendapatkan keuntungan tapi disisi lain debitur merasa dirugikan karena tingginya bunga kredit yang harus dibayar.

Barus dan Erick (2016) menyimpulkan NIM berpengaruh terhadap NPL. Hal ini dikarenakan tingginya NIM menunjukkan efektivitas bank menempatkan aktiva produktif berbentuk kredit. Agustiningtyas (2018) dalam penelitiannya membuktikan NIM tidak berpengaruh terhadap NPL.

Sesuai dengan penjabaran diatas maka diambil kesimpulan bahwa NIM berpengaruh terhadap NPL.

Ho4 : *Net Interest Margin* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

Ha4 : *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

2.4.5 Pengaruh BOPO, *Bank Size*, *Loan to Asset Ratio* dan *Net Interest Margin* terhadap *Non Performing Loan*

BOPO, *Bank Size*, LAR dan NIM adalah faktor internal yang dapat memengaruhi NPL. Menurut Siamat (2005) dalam Putri (2016) salah satu faktor yang dapat memengaruhi pergerakan NPL berasal dari internal, yaitu kemampuan manajemen perbankan.

Penelitian Barus dan Erick (2016) membuktikan CAR, LDR, NIM dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap NPL. Penelitian Kumala dan Suryantini (2015) juga menghasilkan adanya pengaruh simultan antara CAR, *Bank Size* dan *Interest rate BI* terhadap NPL. Selain itu Dwihandayani (2017) menyimpulkan bahwa *BI Rate*, Inflasi, Kredit yang diberikan, LAR dan LDR berpengaruh terhadap NPL.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diambil adalah BOPO, *Bank Size*, LAR dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap NPL.

Ho5 : BOPO, *Bank Size*, LAR dan NIM tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*

Ha5 : BOPO, *Bank Size*, LAR dan NIM berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*